

DAFTAR PUSTAKA

- Antoh, Ester Agustina, 2012. “Manajemen Aset Dalam Rangka Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah di Kabupaten Paniai”. *Tesis S2 Program Pascasarjana UGM*. Yogyakarta.
- Asman, Aulia, dkk. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan). *Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Mataram*. Sumbawa.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016*.
- Fahmi, 2015. “Pemerintah Kota Palembang Mendata Ulang Aset Kepemilikan”, <http://www.AMPERA.CO/baca/pemerintah-kota-palembang-mendata-ulang-aset-kepemilikan.html>. diakses pada (1 Maret 2018).
- Ghozali, Imam. H. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Edisi Keenam. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jamaludin, 2013. “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Studi Pada Pemda Provinsi NT”. *Tesis UGM*. Yogyakarta.
- Jamaludin. 2017. “Pengaruh inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan)”. *E-Jurnal*, Vol.1 No.1. September 2017.
- Pamfilia, dkk (2014). “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap”.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Permerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.

- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Aset Tetap. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Priyatno, 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.
- Seroja, Emma. 2014. "Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari". *Tesis S2 Program Pascasarjana UGM*. Yogyakarta.
- Siregar, D. D. 2004. *Manajemen Aset Strategi Strategi Penanataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyama, A Gima. 2103. *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Guardaya Intimarta. Bandung.
- Sugiono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Duabelas. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- Wahyuni, Ary. 2012. "Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat". *Tesis S2 Program Pascasarjana UGM*. Yogyakarta.